

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PERMINTAAN  
BIAYA TAMBAHAN DILUAR KESEPAKATAN OLEH PELAKU USAHA  
PEMBIAYAAN KONSUMEN PT.CITIFIN MULTIFINANCE  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(STUDI KASUS PUTUSAN : NOMOR 02/BPSK-PBG/PUT-ARBITRASE/VII/2016).

**ABSTRAK**

Oleh  
RADHIKA BAGAS P  
E1A114024

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Kegiatan lembaga pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan konsumen, yaitu merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Adapun dalam skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Konsumen jasa pembiayaan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena terdapat permasalahan mengenai permintaan biaya tambahan (denda) diluar kesepakatan oleh Pelaku usaha pembiayaan konsumen akibat keterlambatan pembayaran angsuran oleh Konsumen, yakni antara Muhammad Fadholi sebagai Konsumen dan PT.CITIFIN Multifinance sebagai Pelaku usaha.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung dari data sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis dan metode analisis data yang digunakan adalah metode *normatif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor: 02/BPSK-PBG/PUT-ARBITRASE/VII/2016 dapat disimpulkan bahwa Muhammad Fadholi sebagai Konsumen telah mendapat perlindungan hukum atas permintaan biaya tambahan oleh PT.CITIFIN Multifinance sebagai Pelaku usaha berdasarkan putusan Majelis Hakim BPSK Purbalingga yang didasarkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 2027K/BU/1984 Tentang Denda (*Pinalty*) yang menolak permintaan biaya tambahan (denda) tersebut, namun dalam putusan tersebut Majelis Hakim BPSK Purbalingga tidak secara jelas menggunakan Pasal 7 huruf (a), (b),(g) dan Pasal 4 huruf (c) dan (h), serta Pasal 8 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : **Perlindungan Hukum, Konsumen, Pembiayaan Konsumen**

LEGAL PROTECTION ON CONSUMER OF ADDITIONAL COST CLAIM  
OUT OF AGREEMENT BY CONSUMER FINANCE INSTITUTION PT  
CITIFIN MULTIFINANCE BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 ON  
CONSUMER PROTECTION.  
(DECISION STUDY : NUMBER 02/BPSK-PBG/PUT-ARBITRASE/VII/2016)

**ABSTRACT**

by  
RADHIKA BAGAS P  
E1A114024

The presence of various financial institutions give huge contribution to the economic development of the society, especially the under-developed society. One of the financial institutions activities is consumer funding, which is a funding model performed by a financial company in the form of financial assistance for the purchase of certain products. As in this thesis discusses the legal protection of consumer funding services based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, because there are problems regarding to additional costs (fines) out of the agreement by consumer finance due to out date of installment payment by consumer, between Muhammad Fadholi as consumer and PT.CITIFIN Multifinance as Businessman.

This research use juridical normative method with statute approach, data that used in this research is secondary and primary data as equipment of primary data. Method of collecting data by literature study to relatable regulations. It is being explained in the form of narative textual sistematically. Method of analysis data in this research is normative qualitative method.

The result on Decision No : 02/BPSK-PBG/PUT-ARBITRASE/VII/2006 could be summarize that Muhammad Fadholi as consumer has been legally protected of additional cost claim by PT. CITIFIN Multifinance as Businessman based on Decision of Judges BPSK Purbalingga considered by Court of Justice Decision Number : 202/K/BU/1984 about Fines (Pinalty) which rejected additional cost claim (fines), yet it is not directly using Provision Article 7 letter (a), (b), (g), and Article 4 letter (c) and (h), also Article 8 paragraph (1) letter (f) Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

**Keywords : Legal Protection, Consumer, Consumer Finance**